

**STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA SEMARANG**

Paradita Cahya

NPP. 29.0836

*Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: paraditacahya16@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The existence of street vendors in Semarang is an easy-to-find phenomenon. It could support formal activities in this location. However, if it is not balanced with order and regularity, their existence will harm other parties. The *Satuan Polisi Pamong Praja* (public order officers) has a job to bring order that must be supported by the ability of persuasive communication to avoid conflict. .

Purpose: This study aims to describe the implementation of the Regulation of Street Vendors in Semarang City, find out what are the obstacles and efforts in the control of Street Vendors, and know the persuasive communication strategy of the *Satuan Polisi Pamong Praja* (public order officers) in the Control of Street Vendors in Semarang City.

Method: Research design used is qualitative research with descriptive method and inductive approach. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion.

Result: The results of research on the Implementation of Controlling Street Vendors, namely the Satuan Polisi Pamong Praja of Semarang City more often go directly to the field to carry out direct control rather than indirect control. Regarding perceived obstacles or obstacles, they can also be overcome through the formation of the Woro-Woro Team. The result of the research indicates that there are internal and external factors which affect the order conducted. **Conclusion:** The result of the research indicates which are strength, weakness, opportunity, and threat. Based on the results of interview and documentation in the field, the strength and opportunity that the strategy has are greater than the threat and obstacle. Therefore, SWOT analysis can be used by the *Satuan Polisi Pamong Praja* to arrange a persuasive strategy to bring order to street vendors in Semarang.

Keywords: Order, Satuan Polisi Pamong Praja (Public Order Officers), Street Vendors, Persuasive

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang merupakan sebuah fenomena yang mudah dijumpai. Kehadiran PKL dapat menunjang kegiatan formal di lokasi tersebut. Namun apabila tidak diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban, keberadaan PKL dapat merugikan pihak lain. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam melaksanakan penertiban harus didukung oleh kemampuan berkomunikasi secara persuasif untuk menghindari terjadinya konflik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, serta mengetahui strategi komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kota Semarang lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban secara langsung daripada penertiban secara tidak langsung. Terkait kendala atau hambatan yang dirasakan juga dapat diatasi melalui dibentuknya Tim Woro-Woro. Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. **Kesimpulan:** Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, kelebihan dan peluang yang dimiliki lebih banyak daripada adanya ancaman dan hambatan. Sehingga melalui analisis SWOT dapat digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun strategi dalam melaksanakan penertiban PKL secara persuasif di Kota Semarang.

Kata kunci: Penertiban; Satuan Polisi Pamong Praja; Pedagang Kaki Lima; Persuasif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima merupakan profesi pedagang yang menjajakan barang dagangannya di trotoar atau di tempat-tempat umum yang dinilai strategis dengan modal yang relatif sedikit. Keberadaan PKL di kota-kota besar merupakan sebuah fenomena yang sangat mudah dijumpai. Kehadiran PKL dapat menunjang kegiatan formal di lokasi tersebut. Apabila pemerintah daerah dapat mengelola dengan baik, potensi ini dapat memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika tidak diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban para Pedagang Kaki Lima itu sendiri, keberadaannya dapat merugikan pihak lain.

Kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintahan tersebut memiliki dampak penting terhadap dinamika kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satu wujud

dari program tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Semarang terdapat 3.768 PKL dan 625 PKL insidentil yang terdaftar. Dari data tersebut menunjukkan jumlah PKL maupun PKL Insidentil Kota Semarang yang cukup besar. Pada kenyataannya Pedagang kaki Lima dalam melakukan aktivitasnya seringkali menggunakan ruang umum yang tidak ditetapkan sebagai lokasi peruntukan (Fajlin, 2021). Situasi ini jelas dapat menimbulkan persoalan kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Mayoritas dari PKL berjualan di ruang publik dan fasilitas umum, seperti di badan jalan dan trotoar yang semestinya dapat digunakan oleh pejalan kaki. Maka dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan peraturan daerah dalam hal ini khususnya penertiban PKL. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Pasal 4, menyatakan bahwa : “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum, serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota”.

Saat ini kejadian penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima masih sering terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena dianggap tidak mempunyai izin berjualan dan dianggap berjualan tidak pada tempatnya. Akibatnya, Satpol PP kerap kali dikenal sebagai tukang gusur serta bersikap arogan dan kaku (Wahyu, 2021). Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam melaksanakan penertiban harus didukung oleh kemampuan berkomunikasi secara persuasif untuk menghindari terjadinya konflik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Syamsuddin R (2020) dengan judul: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif hukum empiris (empiris-yuridis) dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui peranan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima. (Syamsuddin, 2020)

Sabillah A. dan Roosinda F. (2020) dengan judul: Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah mengukur efektivitas komunikasi persuasif Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). (Sabillah & Roosinda, 2020)

Sartika, dkk (2019) dengan judul: Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui strategi komunikasi humas satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban pedagang kaki lima. (Sartika et al., 2019)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis menggunakan 3 (tiga) jurnal yang telah dipublikasikan dan terakreditasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Adapun berbagai perbedaan dari ketiga jurnal dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti 1 mengkaji mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. Teori utama yang digunakan jurnal tersebut adalah teori kinerja, sedangkan peneliti menggunakan teori strategi.
- b. Peneliti 2 menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian.
- c. Peneliti 3 berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan peneliti berfokus kepada strategi komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pedagang Kaki Lima di Kota.

Ketiga hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, selanjutnya dari referensi dan perbandingan ketiga penelitian tersebut peneliti akan mencoba lebih mendetail pada strategi komunikasi persuasif oleh Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Semarang.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, serta mengetahui strategi komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

II. METODE

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana proses dalam pencarian fakta dilakukan dengan interpretasi yang tepat, mempelajari problematika yang terjadi didalam masyarakat, dan segala situasi yang termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, proses serta pengaruh yang dihasilkan dari sebuah fenomena (Nazir, 2011). Adapun jenis sumber data yang digunakan penulis yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Kepala Bagian Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasional, serta beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Pedagang Kaki Lima dan masyarakat. Teknik analisis data yang peneliti gunakan mengadopsi teori Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) yaitu melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Ketertiban umum menjadi suatu aspek kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang peneliti telah melakukan pengamatan yang mengacu pada penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjayanti yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

A. Penertiban Langsung

Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penertiban yang dilakukan secara langsung yaitu melaksanakan patroli ketika dalam pelaksanaan patroli ditemui masyarakat yang tidak taat atau melanggar peraturan Pedagang Kaki Lima seperti tidak menempti daerah peruntukan untuk berdagang maupun berjualan tidak sesuai jamnya. Maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menegur secara lisan serta memberikan informasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menerapkan jadwal rutin dalam melaksanakan penertiban dua kali dalam satu hari untuk melakukan patroli yaitu patroli pagi dan sore hari. Selain patroli rutin, Satpol PP Kota Semarang juga melaksanakan penertiban apabila ada laporan dari masyarakat maupun dari Pimpinan Daerah. Untuk laporan masyarakat, seperti adanya warga masyarakat yang melaporkan keresahan seperti suasana didaerah tersebut sudah tidak kondusif akibat adanya Pedagang Kaki Lima, maka dari pihak Satpol PP akan mengadakan patroli menertibkan sesuai peraturan daerah yang ada.

B. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan sosialisasi melalui gambar ataupun video yang bisa diakses di website Badan Satuan Polisi Pamong Praja. Ada beberapa sarana prasarana yang bisa digunakan sebagai media penertiban secara tidak langsung contohnya adalah pemasangan banner di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi dan dilintasi masyarakat agar banner yang berisi tentang penertiban bisa dibaca masyarakat sehingga masyarakat lebih sering membaca kemudian harapannya bisa untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti mengetahui di tempat-tempat umum dipasang banner yang berisi larangan berjualan bagi PKL dan ini merupakan salah satu penertiban secara tidak langsung yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

3.2 Kendala dan Upaya yang dilakukan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap informan maka dapat diketahui beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib dan sulit diatur.

Faktor yang menjadi kendala selanjutnya adalah Lingkungan masyarakat sekitar yang tidak mendukung pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima. Ketika sudah dilakukan penertiban PKL dan diberi relokasi tempat, dikemudian hari PKL tersebut akan kembali ditempat semula itu karena memang masyarakat lingkungan sekitar mendukung PKL untuk berjualan dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dengan cara melakukan pendekatan persuasif kepada PKL dan masyarakat sekitar melalui dibentuknya Tim Woro-Woro. Tim Woro-Woro merupakan tim yang dibentuk guna melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima melalui sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait lokasi atau waktu yang diizinkan bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan, maupun memberikan teguran lisan serta tertulis kepada PKL pelanggar ketertiban.

3.3 Strategi Komunikasi Persuasif Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rangkuti, bahwa dalam suatu strategi harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu usaha/organisasi seperti faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan pada pendapat menurut Rangkuti, variable yang berpengaruh pada pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang menggunakan cara komunikasi persuasif, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adanya analisis lingkungan internal berfungsi untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Dalam menganalisis lingkungan internal dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja
- Sarana dan Prasarana dalam penertiban Pedagang Kaki Lima
- Sumber daya Manusia
- Sistem Informasi dan Komunikasi

Dalam suatu strategi, Satuan Polisi Pamong Praja harus mengumpulkan informasi-informasi terkait hal yang menjadi indikator dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, setelah itu menganalisis hal-hal yang mempengaruhi penertiban seperti mengetahui apa yang menjadi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari proses penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif serta yang terakhir membuat suatu keputusan yang tepat mengenai bagaimana merumuskan suatu strategi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna memutuskan suatu strategi. Analisis SWOT dilakukan setelah mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Setelah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, berikut ini adalah rincian mengenai identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1
Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal	
Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1. Adanya struktur organisasi yang jelas 2. Adanya Tim khusus yang dibentuk dalam Penertiban PKL secara persuasif 3. Visi misi yang berkesinambungan dengan visi misi pemerintah daerah 4. Sarana dan prasarana yang mencukupi 5. Penyampaian informasi yang jelas	1. Kurangnya jumlah personil 2. Kurangnya SDM yang berkompentensi 3. Kurang berjalannya penertiban tidak langsung

Faktor Eksternal	
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
1. Adanya peraturan yang jelas dalam mengatur penertiban PKL 2. Dukungan pemerintah dalam penertiban 3. Upaya pemberdayaan PKL sebagai penunjang sektor informal 4. Adanya koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	1. Lingkungan masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan penertiban PKL 2. Budaya rasa tidak tega dalam penertiban 3. Citra Satpol PP yang dikenal sebagai tukang gusur serta bersikap arogan dan kaku 4. PKL yang sulit diatur

Sumber: Data primer setelah diolah, 2022

Tabel menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri atas 5 kekuatan dan 3 kelemahan, sehingga dapat diartikan bahwa Satpol PP Kota Semarang memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga dapat meminimalkan kelemahan dalam melaksanakan penertiban secara persuasif. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri atas 4 peluang dan 4 ancaman.

Setelah melakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal maka selanjutnya dapat dirincikan dalam IFAS (Internal Factor analysis Summary) yang merupakan analisis faktor internal dan EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) yang merupakan analisis faktor eksternal. Pemberian bobot disusun berdasarkan dampak penting hingga tidak penting. Sedangkan Rating diberikan nilai mulai dari 1 hingga 4 berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL Kota Semarang. Data yang terdapat dalam tabel menunjukkan bahwa bobot kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang lebih besar dibandingkan dengan bobot kelemahan. Berikut ini adalah rincian mengenai analisis faktor internal atau Internal Factor analysis Summary Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima:

Tabel 2
IFAS (Internal Factor analysis Summary)

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Nilai
1	Adanya Tim khusus yang dibentuk dalam Penertiban PKL secara persuasif	0.18	4	0.72
2	Adanya struktur organisasi yang jelas	0.14	3	0.42
3	Sarana dan prasarana yang mencukupi	0.14	3	0.42
4	Penyampaian informasi yang jelas	0.14	3	0.42
5	Visi misi yang berkesinambungan dengan visi misi pemerintah daerah	0.10	2	0.20
Subtotal		0.70	15	2.18
No.	Kelemahan			
1	Kurangnya SDM yang berkompetensi	0.14	3	0.42

2	Kurangnya jumlah personil	0.10	2	0.20
3	Kurang berjalannya penertiban tidak langsung	0.06	1	0.06
Subtotal		0.30	6	0.68
Total		1	21	2,86

Sumber: Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, faktor internal menunjukkan bahwa ada 5 jenis kekuatan dan ada 3 kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban secara persuasif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekuatan yang lebih besar dalam melaksanakan penertiban. Perkalian antara kolom bobot dan kolom rating menghasilkan nilai/skor bagi faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Total nilai dari nilai IFAS adalah 2.86.

Berikut ini adalah rincian mengenai analisis faktor eksternal atau (Eksternal Factor analysis Summary) Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima:

Tabel 3
EFAS (Eksternal Factor analysis Summary)

No.	Peluang	Bobot	Rating	Nilai
1	Adanya peraturan yang jelas dalam mengatur penertiban PKL	0.18	4	0.72
2	Adanya koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	0.15	3	0.45
3	Dukungan pemerintah dalam penertiban	0.15	3	0.45
4	Upaya pemberdayaan PKL sebagai penunjang sektor informal	0.08	1	0.08
Subtotal		0.56	11	1.70
No.	Ancaman			
1	Lingkungan masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan penertiban PKL	0.18	4	0.72
2	PKL yang sulit diatur	0.12	2	0.24
3	Budaya rasa tidak tega dalam penertiban	0.07	1	0.07
4	Citra Satpol PP yang dikenal sebagai tukang gusur serta bersikap arogan dan kaku	0.07	1	0.07
Subtotal		0.44	8	1.10
Total		1	19	2,80

Sumber: Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, EFAS menunjukkan terdapat 4 jenis kekuatan dan ada 4 kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban secara persuasif.. Data yang terdapat dalam tabel menunjukkan bahwa bobot peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang lebih besar dibandingkan dengan bobot ancaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peluang yang lebih besar dalam dalam melaksanakan penertiban. Perkalian antara kolom bobot dan kolom rating menghasilkan nilai/skor bagi faktor eksternal (peluang dan ancaman). Total nilai dari nilai EFAS adalah 2.80.

Matriks SWOT yang memuat keadaan internal dan eksternal untuk menghasilkan alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>STRENGTH (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur organisasi yang jelas 2. Adanya Tim Woro-Woro yang dibentuk dalam Penertiban PKL secara persuasif 3. Visi misi yang berkesinambungan dengan visi misi pemerintah daerah 4. Sarana dan prasarana yang mencukupi 5. Penyampaian informasi dan komunikasi yang jelas 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah personil 2. Kurangnya SDM yang berkompetensi 3. Kurang berjalannya penertiban tidak langsung
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan yang jelas dalam mengatur penertiban PKL 2. Dukungan pemerintah dalam penertiban 3. Upaya pemberdayaan PKL sebagai penunjang sektor informal 4. Adanya koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan peraturan mengenai Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsi. (S1+O1) 2. Mempertahankan penyampaian informasi yang jelas dalam upaya penertiban secara persuasif. (S5+O3) 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> (W1+O4) 2. Meningkatkan SDM yang berkopetensi. (W2+O2)

THREATS (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Lingkungan dan budaya masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan penertiban PKL 2. Citra Satpol PP yang dikenal sebagai tukang gusur serta bersikap arogan dan kaku 3. PKL yang sulit diatur	1. Memaksimalkan peran Tim Woro-Woro dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat (S2+T1,T2) 2. Memaksimalkan peran Tim Woro-Woro dalam melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (S2+T3)	1. Semua anggota Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif dalam melaksanakan tugas (W1+T2)

Sumber: Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa alternatif strategi komunikasi persuasif Satuan Polisi pamong Praja dalam Penertiban, antaranya sebagai berikut:

a. Strategi S-O (Strength-Opportunities)

1. Memanfaatkan peraturan mengenai Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dalam menjalankan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Mempertahankan penyampaian informasi yang jelas dalam upaya penertiban secara persuasif. Penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui upaya sosialisasi, teguran lisan, teguran tertulis maupun penyitaan barang sementara waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penyampaian informasi yang jelas agar PKL dapat memahami maksud dan tujuan penertiban dengan baik.

b. Strategi W-O (Weakness-Opportunities)

1. Meningkatkan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait penertiban PKL secara persuasif. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki Satpol PP Kota Semarang dapat menghambat pelaksanaan penertiban. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Camat dan Lurah untuk menindaklanjuti daerah yang telah ditertibkan oleh anggota Satpol PP.
2. Meningkatkan SDM yang berkopetensi. Dengan adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban secara persuasif. Diharapkan pemerintah dapat membantu meningkatkan berkecakupan dan berkeahlian anggota Satpol PP Kota Semarang khususnya dalam melakukan penertiban.

c. Strategi S-T (Strength-Threats)

1. Memaksimalkan peran Tim Woro-Woro dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Selain melaksanakan penertiban terhadap PKL, Tim Woro-Woro juga bertugas dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak mengundang PKL untuk berdagang di tempat yang bukan peruntukannya. Hal ini juga dapat merubah citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tukang gusur dan bersikap arogan, tetapi pada kenyataannya Satpol PP Kota Semarang sangat persuasif dalam melaksanakan tugasnya.

2. Memaksimalkan peran Tim Woro-Woro dalam melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima. Tim ini dibentuk untuk melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima secara lebih persuasif. Diharapkan Tim Woro-Woro dapat melakukan penertiban melalui pendekatan kepada PKL melalui sosialisasi atau teguran bahwa berjualan di ruang publik yang sudah dilarang memberikan dampak yg negatif bagi masyarakat dan lingkungan sehingga perlu adanya kesadaran bagi para PKL untuk tidak melanggar tempat yang sudah dilarang.
- d. Strategi W-T (Weakness- Threats)
1. Semua anggota Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif dalam melaksanakan tugas. Apabila semua anggota Satuan Polisi Kota Semarang menggunakan pendekatan persuasif dalam melaksanakan tugas, akan memperbaiki citra Satpol PP dimata masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif dapat meningkatkan citra baik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Penulis menemukan temuan penting yakni strategi dengan dibentuknya Tim Woro-Woro bertujuan untuk melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima secara lebih persuasif. Diharapkan Tim Woro-Woro dapat melakukan penertiban melalui pendekatan kepada PKL melalui sosialisasi atau teguran bahwa berjualan di ruang publik yang sudah dilarang memberikan dampak yg negatif bagi masyarakat dan lingkungan sehingga perlu adanya kesadaran bagi para PKL untuk tidak melanggar tempat yang sudah dilarang.

Dalam penelitian terdapat perbedaan dengan temuan Sartika, dkk bahwa strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan Humas Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat memaksimalkan penertiban secara tidak langsung. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban secara langsung daripada penertiban secara tidak langsung.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Semarang adalah Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib dan sulit diatur, serta lingkungan masyarakat sekitar yang tidak mendukung pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dengan cara melakukan pendekatan persuasif kepada PKL dan masyarakat sekitar melalui dibentuknya Tim Woro-Woro.
3. Alternatif strategi yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang menggunakan cara komunikasi persuasif:
 - memanfaatkan peraturan mengenai Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsi,
 - mempertahankan penyampaian informasi yang jelas,

- Meningkatkan koordinasi dengan *Stakeholder*,
- meningkatkan SDM yang berkopetensi,
- memaksimalkan peran Tim Woro-Woro dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pedagang kaki lima.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Semarang saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima secara persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Adi Marhasatya.
- Eviani, E., & Hasan, E. 2013. *Menggagas Komunikasi Masa Depan*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Heene, Aime, Desmidt, S., Afiff, F., & Abdullah, I. 2010. *Manajemen Strategik Keorgansiasian Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kothari, C. R. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques* (2nd ed.). New Delhi: New Age International.
- Mardiasmo. 2018. *Akutansi Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Maulana, H., & Gumelar, G. 2013. *Psikologi Komunikasi dan Persuasif*. Jakarta: Akademia Permata.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peorwandari, K. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Rangkuti, F. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (14th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian* (Rusmini (Ed.)). Jambi: Pusaka.
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi* (Nurul Falah Atif (Ed.); 3rd ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiro, A. 2018. *Perilaku Organisasi* (Restu Damayanti (Ed.)). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D* (28th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Suhardono. 1994. *Teori Perananan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Uchjana, O. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (T. Surjaman (Ed.); 23rd ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winardi, J. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarni, E. W. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Restno Ayu Kusumaningtyas (Ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

B. Jurnal Ilmiah

- Desthiani, U. 2019. Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Sekretari*, 6(2), 231.
- Meirianti, A. R. 2018. Efektivitas Cyber Public Relations Pada Media Sosial Instagram Satpol Pp Kota Surabaya. *Media Dan Komunikasi*, 1.
- Rukmana, M. G. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, 1(2). <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536>
- Sabillah, A. P., & Roosinda, F. W. 2020. Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 163–173. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.4089>
- Sartika, Pirhat Abbas, Nurhasanah, Mardalina, & Muhsin Ruslan. 2019. Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima. *Mauizoh: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v3i2.18>
- Suhendi, D. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Syamsuddin, R. A. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1). <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>
- Wahyuni, S. 2014. *Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law*. 3(1).

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

D. LAIN-LAIN

- http://semarangkota.go.id/p/1729/laju_pertumbuhan_ekonomi_kota_semarang_terus_mengalami_peningkatan
<https://data.jatengprov.go.id/>
<https://semarangkota.bps.go.id>
<https://www.rmoljawatengah.id/semarang-jadi-kota-besar-dengan-pemulihan-ekonomi-tercepat>

Wahyu, Y. 2021,29 Agustus. *Menghadirkan Satpol PP Lebih Humanis*. *Kompas*, 4.